

## RANCANG BANGUN APLIKASI PENANGANAN BERKAS PERKARA DI POLRES JEMBER

Dwi Yuniar Pradoko<sup>1)</sup> M.J. Dewiyani Sunarto<sup>2)</sup> Tony Soebijono<sup>3)</sup>

Program Studi/Jurusan Sistem Informasi  
Fakultas Teknologi dan Informatika  
Institut Bisnis dan Informatika Stikom Surabaya  
Jl. Raya Kedung Baruk 98 Surabaya, 60298

Email : 1)[Niarpradoko@gmail.com](mailto:Niarpradoko@gmail.com), 2)[Dewiyani@Stikom.Edu](mailto:Dewiyani@Stikom.Edu), 3)[Tonys@stikom.edu](mailto:Tonys@stikom.edu)

**Abstract:** *Kepolisian Resort (Polres) Jember is the command structure of the Polri in the district town of Jember. The task of the Polres is based on decree no. 23 of 2010/ Chapter 2/ Paragraph 2/ Article 5. Under the regulation, Polres Jember can not be separated from the case file handling and issuance of Police Notes (SKCK). The number of cases handled and the number of application for the issuance of public SKCK cause officers find it difficult which is required to work faster in doing their job. This is due to the absence of applications that can help performance in Jember Police officers. In this study, the problem is solved by building a case file handling applications in Polres Jember using the System Development Life Cycle (SDLC). Case files handling application built to facilitate Polres Jember officers in handling the case file and publishing SKCK. After testing, case files handling application in Polres Jember is able to overcome the existing problems in accordance with SOP Transparansi Di Bidang Penyidikan Sat Reskrim Polres Jember Year 2009 and Police Chief Regulation of the Republic of Indonesia Number 18 of 2014 on the Procedure for the Issuance of Police Notes. So this application can manage and archive the case file, manage PUSINAFIS data, manage SKCK data, and generate crime reports and SKCK reports.*

**Keywords:** *Case Files, Police Record, PUSINAFIS*

Kepolisian Resort (Polres) Jember adalah struktur komando Polri di kabupaten/kota Jember. Berdasarkan Peraturan No 23 Tahun 2010/Bab 2/Paragraf 2/Pasal 5 berbunyi;

“Polres bertugas menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam rangka memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dan melaksanakan tugas-tugas Polri lainnya dalam daerah hukum Polres, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Polres Jember mempunyai beberapa tugas, diantaranya yaitu menangani berkas perkara dan penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK). Proses penanganan berkas perkara dimulai dari diterimanya pengaduan masyarakat oleh bagian Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT). Lalu dibuatkan Laporan Polisi (LP) dan diregistrasi pada buku register B-1, setelah itu LP diserahkan kepada Kepala Satuan (Kasat) guna penunjukan penyidik. Setelah LP diterima oleh penyidik akan dilakukan proses penyidikan dan melengkapi administrasi penyidikan sampai berkas perkara diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Adapun permasalahan yang terjadi antara lain, setiap LP yang masuk, SPKT mendistribusikan LP kepada Kasat secara manual. Distribusi yang masih manual dengan cara mendatangi stakeholder secara langsung akan menimbulkan resiko keterlambatan penyampaian. Di bagian Kasat selama ini melakukan penunjukan penyidik dengan cara manual, sehingga Kasat tidak dapat mengetahui beban perkara yang

ditangani penyidik dan juga tidak dapat melakukan pemantauan secara langsung penanganan perkara yang ditangani oleh masing-masing penyidik.

Pada penerbitan SKCK, permasalahan yang terjadi terletak pada proses penyimpanan (rekaman/pencatatan dan pengarsipan). Selama ini proses penyimpanan data pemohon SKCK dan data pelaku kriminal masih dalam bentuk kertas yang dibukukan dan disimpan pada rak-rak khusus. Sehingga untuk menghasilkan laporan masih kurang efisien. Petugas harus mengecek, memilah, dan mengelompokkan data kriminal satu per-satu sesuai jenis pelanggaran. Begitu pula pada penyimpanan data pemohon SKCK menimbulkan kesulitan dalam proses pencarian. Pemohon yang pernah memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan kriminal tidak terdeteksi dengan baik, sehingga SKCK yang dihasilkan kurang valid.

Dengan demikian solusi yang akan digunakan dalam mengatasi permasalahan yang ada yaitu tetap mengacu pada SOP Transparansi Di Bidang Penyidikan Sat Reskrim Polres Jember Tahun 2009 dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian dengan memanfaatkan teknologi informasi berbasis web. Aplikasi ini diharapkan dapat memudahkan pejabat Kasat untuk memantau (monitoring) sebuah berkas perkara, sehingga dapat diketahui status perkara misalnya : penyidik yang menangani dan status terakhir dari perkara tersebut. Aplikasi diharapkan juga dapat mengarsipkan berkas-berkas perkara pidana serta dapat menghasilkan laporan terkait dengan data kriminalitas berdasarkan periode dan berdasarkan daerah di wilayah Jember. Dan aplikasi juga diharapkan dapat membantu

petugas SKCK dalam melakukan proses penyimpanan serta pencarian data pemohon SKCK dan pemberian nomor SKCK otomatis sehingga proses pembuatan SKCK akan lebih mudah dan cepat.

**METODE**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan tahapan Siklus Hidup Pengembangan Sistem. Siklus Hidup Pengembangan Sistem (SHPS) atau dalam bahasa asing disebut *System Development Life Cycle* (SDLC) adalah sebuah pendekatan untuk menganalisis dan merancang sistem yang telah dikembangkan dengan baik melalui penggunaan siklus kegiatan penganalisis dan pemakai secara spesifik dengan melalui tujuh tahap yaitu mengidentifikasi masalah, peluang, dan tujuan, menentukan kebutuhan informasi pengguna, menganalisis kebutuhan system, merancang sistem yang direkomendasikan, mengembangkan dan mendokumentasikan perangkat lunak, menguji dan mempertahankan sistem dan mengimplementasikan dan mengevaluasi sistem (Kendall dan Kendall, 2008).

1. Mengidentifikasi masalah, peluang dan tujuan

Tabel 1 Tabel Identifikasi Penyebab Masalah

No	Masalah	Penyebab	Solusi yang ditawarkan
1	Pendistribusian laporan polisi / pengaduan masyarakat dari SPKT kepada Kasat membutuhkan waktu lama, yaitu hanya dilakukan pada pukul 08.00 atau pada saat pergantian piket.	Distribusi yang masih manual dengan cara mendatangi <i>stakeholder</i> secara langsung akan menimbulkan resiko keterlambatan penyampaian.	Sebuah aplikasi yang dapat membantu untuk mendistribusikan laporan polisi / pengaduan masyarakat secara cepat, sehingga dapat mengurangi resiko keterlambatan penyampaian.
2	Pemantauan terhadap penanganan perkara tidak dapat terlaksana dengan baik.	Kasat tidak dapat melakukan pemantauan secara langsung sampai manakah penanganan perkara yang ditangani oleh masing-masing penyidik.	Sebuah aplikasi yang dapat memantau status terakhir dari suatu perkara.
3	Kasat tidak dapat mengetahui beban perkara yang sedang ditangani oleh penyidik.	Selama ini Kasat melakukan penunjukan penyidik secara manual.	Sebuah aplikasi yang dapat menyajikan informasi beban perkara yang sedang ditangani oleh penyidik.
4	Pemohon yang akan melakukan perpanjangan	Penyimpanan data pemohon SKCK masih	Sebuah aplikasi yang dapat mengelola data

No	Masalah	Penyebab	Solusi yang ditawarkan
	SKCK karena masa berlaku SKCK sudah habis, mereka harus mengikuti semua prosedur pembuatan SKCK mulai dari awal seperti mengisi formulir dan perumusan sidik jari, padahal mereka sudah pernah mengisi formulir tersebut.	dalam bentuk kertas yang dibukukan dan disimpan pada rak-rak khusus.	pemohon SKCK, sehingga proses perpanjangan SKCK akan lebih mudah dan cepat.
5	Pemohon yang pernah memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan kriminal tidak terdeteksi dengan baik.	Penyimpanan data pelaku kriminal masih dalam bentuk kertas yang dibukukan dan disimpan pada rak-rak khusus.	Sebuah aplikasi yang dapat mengelola data pelaku kriminal, sehingga mengurangi kesalahan dan keterlambatan dalam memberikan informasi data.
6	Pemberian nomor SKCK rentan mengalami kesalahan.	Pemberian nomor SKCK dilakukan secara manual.	Sebuah aplikasi yang dapat membantu untuk pemberian nomor SKCK.
7	Untuk dapat menghasilkan laporan dari data kriminal maupun data SKCK masih kurang efisien.	Petugas harus mengecek, memilah, dan mengelompokkan data kriminal satu per-satu sesuai jenis pelanggaran. Begitu pula pada laporan penerbitan SKCK, petugas harus menyalin kembali data pemohon berdasarkan periode tertentu.	Sebuah aplikasi yang dapat membantu untuk menghasilkan laporan kriminalitas dan laporan SKCK.
8	Penyimpanan arsip berkas perkara menimbulkan kesulitan dalam pemeliharaannya.	Selama ini penyimpanan arsip berkas perkara dalam bentuk <i>hardcopy</i> .	Sebuah aplikasi yang dapat membantu dalam penyimpanan berkas perkara.

2. Menentukan Kebutuhan Informasi Pengguna

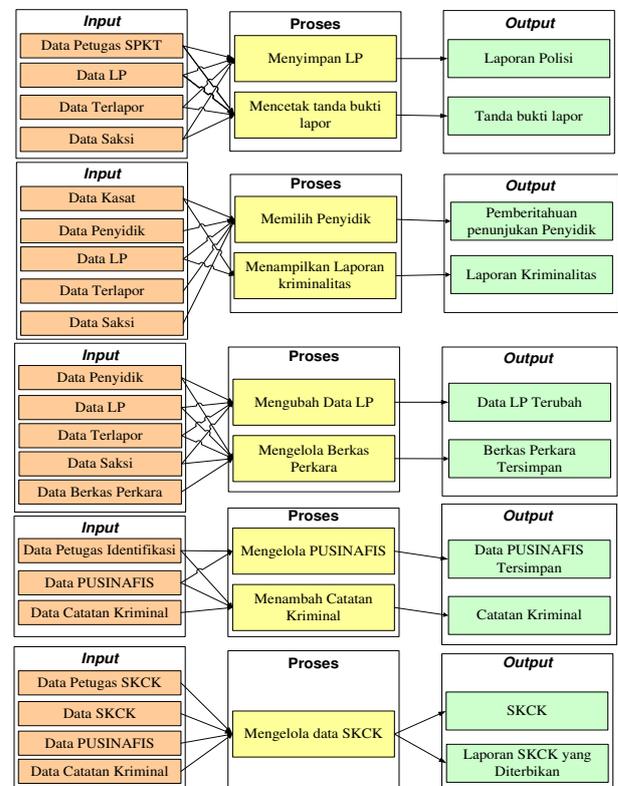
Tahap ini dilakukan untuk mengetahui hal-hal yang berhubungan dengan syarat-syarat informasi atau batasan-batasan tertentu seperti siapa saja yang

mempunyai hak akses suatu sistem, syarat apa yang dilengkapi untuk penerbitan SKCK, dan lain sebagainya. Berhubungan dengan syarat yang dicontohkan tersebut maka ada beberapa hal batasan yaitu :

- a. Pada aplikasi ini terdapat 6 (enam) user dengan hak akses yang berbeda, yaitu :
    1. Admin mempunyai hak akses yang paling luas sehingga mampu mengakses semua halaman yang ada pada aplikasi, tapi tugas utama admin adalah untuk *maintenance* data-data pada master seperti master *users*.
    2. SPKT hanya bertugas untuk menambah data LP, oleh karena itu SPKT mempunyai hak akses pada halaman SPKT yang meliputi tambah data LP, dan mencetak tanda bukti lapor untuk diberikan kepada pelapor.
    3. Kasat mempunyai hak akses menunjuk penyidik yang menangani perkara, melihat detail penyidik, melihat detail perkara dan melihat laporan kriminalitas.
    4. Penyidik mempunyai hak akses mengelola data LP dan melengkapi administrasi penyidikan lalu menyimpannya kedalam aplikasi.
    5. Bagian SKCK mempunyai hak akses untuk mengelola data SKCK, mencetak SKCK, dan melihat laporan.
    6. Bagian identifikasi mempunyai hak akses mengelola data PUSINAFIS dan mengelola data catatan kriminal.
  - b. Pemohon yang akan membuat SKCK maupun memperpanjang SKCK wajib melengkapi berkas persyaratan terlebih dahulu dan dikenai biaya administrasi Rp 10.000,00 .
  - c. Waktu pelayanan pengaduan masyarakat di SPKT dilakukan setiap hari selama 24 jam. Waktu pelayanan penerbitan SKCK pada hari senin – kamis pukul 08.00 - 15.00, hari jumat pukul 08.30 – 15.30, hari sabtu pukul 08.30 – 12.00.
3. Menganalisis Kebutuhan Sistem  
 Analisis kebutuhan sistem ini akan menjelaskan tentang beberapa hal mengenai beberapa kebutuhan pengguna, seperti contohnya *user* yang terlibat dalam sistem dan informasi yang dihasilkan oleh sistem sehingga bermanfaat bagi *users*. Diagram Blok Aplikasi Penanganan Berkas Perkara di Polres Jember dapat dilihat pada Gambar 1.
  4. Merancang Sistem yang Direkomendasikan  
 Perancangan meliputi desain tampilan antar muka pengguna (*user interface*) dari perangkat lunak yang meliputi desain tampilan masukan (*input*) untuk

perangkat lunak dan desain keluaran (*output*) dari perangkat lunak berupa laporan.

5. Mengembangkan dan Mendokumentasikan Perangkat Lunak  
 Pada tahap ini akan dijabarkan mengenai *form* dan fungsi pada aplikasi
6. Menguji dan mempertahankan sistem  
 Tahap ini berfungsi untuk memastikan bahwa sistem sudah sesuai dengan kebutuhan atau tujuan yang diharapkan. Uji coba terhadap aplikasi dengan menggunakan *black box testing*.
7. Mengimplementasikan dan Mengevaluasi Sistem  
 Pada Polres Jember tidak mempunyai sistem yang terintegrasi, sehingga sistem akan diimplementasikan secara langsung tanpa adanya perencanaan konversi sistem lama ke sistem yang baru.



Gambar 1 Diagram Blok Aplikasi Penanganan Berkas Perkara

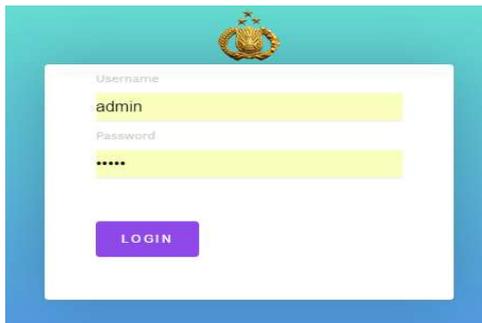
### HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil uji coba yang telah dilakukan sejumlah 38 *test case* bahwa output yang diharapkan dari *test case* telah sukses tercapai. Fungsi-fungsi dan fitur-fitur dasar aplikasi telah berjalan dengan baik.

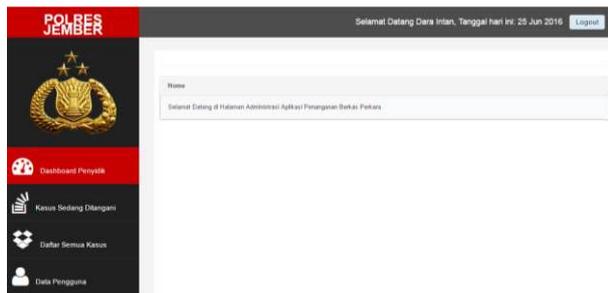
#### Halaman Login

Halaman *login* adalah sebuah halaman yang berfungsi untuk mengecek akun anggota yang akan menggunakan aplikasi penanganan berkas perkara di Polres Jember. Anggota memasukkan *username* dan *password* kemudian menekan tombol login. Jika anggota tidak memiliki hak untuk mengakses aplikasi ini atau anggota salah memasukkan *username* dan

password maka aplikasi tidak akan memberikan akses untuk masuk dan menggunakan aplikasi. Jika anggota memiliki hak untuk mengakses aplikasi ini atau anggota memasukkan *username* dan *password* dengan benar maka aplikasi akan memberikan akses untuk masuk dan menggunakan aplikasi. Halaman *login* digunakan oleh enam jenis pengguna yaitu, *administrator*, SPKT, Kasat, penyidik, unit identifikasi dan unit SKCK. Tampilan halaman *login* dapat dilihat pada gambar 2, tampilan halaman penyidik dapat dilihat pada gambar 3.



Gambar 2 Tampilan Halaman Login



Gambar 3 Tampilan Halaman Penyidik

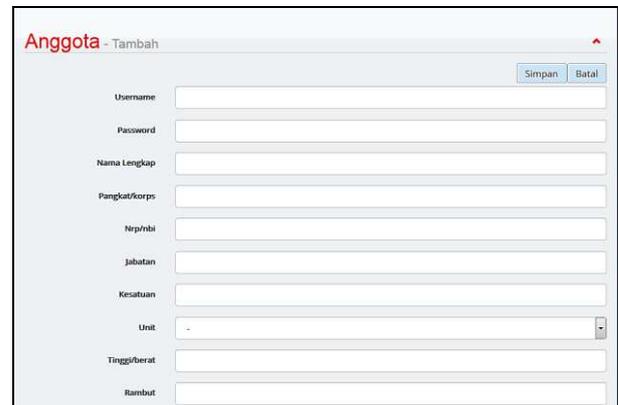
Halaman Mengelola Data Pengguna



Gambar 4 Tampilan Halaman Mengelola Data Pengguna

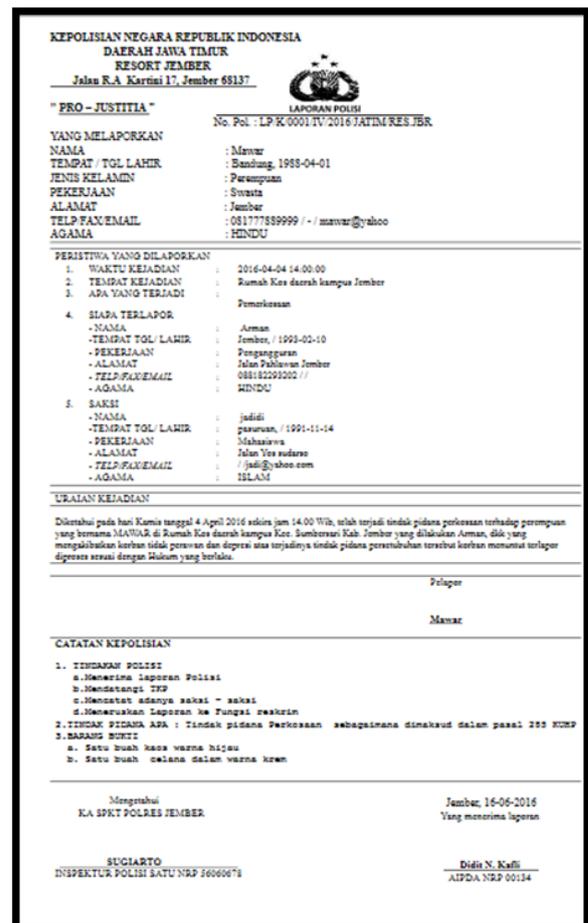
Halaman mengelola data pengguna adalah sebuah halaman yang berfungsi untuk menambah dan mengubah data anggota pada aplikasi penanganan berkas perkara di Polres Jember. *Administrator* dapat menambah dan mengubah data dengan memasukkan data *username*, *password*, nama lengkap, pangkat/korps, *nrp/nbi*, jabatan, kesatuan, unit, tinggi/berat, rambut, mata, golongan darah, tempat lahir, tanggal lahir, agama, alamat, foto, dan status. *Username* dan *password* harus diisi sebagai syarat

memasukkan data pada saat *login* anggota. Tampilan halaman mengelola data pengguna dapat dilihat pada gambar 4, tampilan halaman tambah dan ubah data pengguna dapat dilihat pada gambar 5.



Gambar 5 Tampilan Halaman Tambah dan Ubah Data Pengguna

Halaman Tambah Laporan Polisi



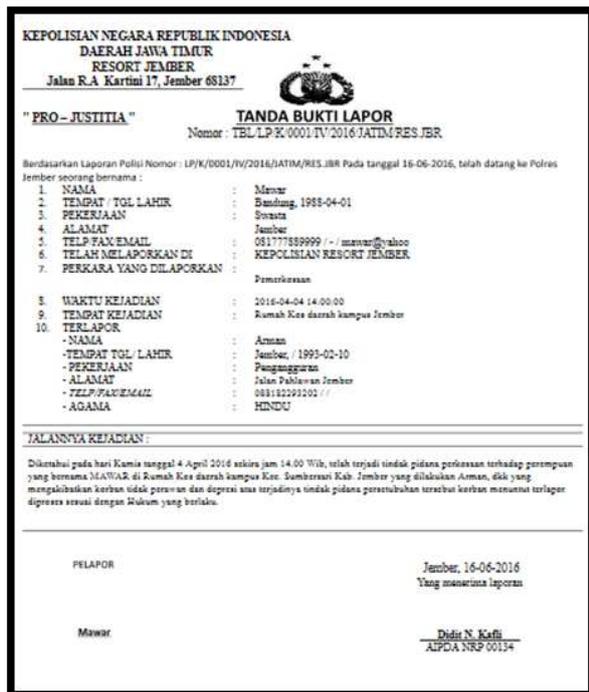
Gambar 6 Tampilan Halaman Cetak Laporan Polisi

Halaman tambah laporan polisi adalah sebuah halaman yang berfungsi untuk menyimpan data pengaduan dari masyarakat. Melalui halaman ini, petugas SPKT dapat menambah laporan polisi yang

berisi data pelapor, data terlapor, data saksi, peristiwa, uraian kejadian, dan catatan kepolisian. Petugas SPKT juga dapat mencetak laporan polisi dan tanda bukti lapor dengan menekan tombol cetak. Tampilan halaman tambah laporan polisi dapat dilihat pada gambar 7, tampilan halaman cetak laporan polisi dapat dilihat pada gambar 6, dan tampilan halaman cetak tanda bukti lapor dapat dilihat pada gambar 8.

#	Nomor	Nama Pelapor	Apa Yang Terjadi	Penyidik	Status Perkara	Tanggal Laporan
1	LPK/0001/VI/2016 /JATIMRES/JBR	RIDWAN ADI	Pencurian	DEDY RETAFIKAL EFENDI	PENYELIDIKAN	10-08-2016
2	LPK/0001/IX/2015 /JATIMRES/JBR	ILMI MURIDAH	PERAMPOKAN	DEDY RETAFIKAL EFENDI	PENYIDIKAN	15-10-2015
3	LPK/0001/II/2016 /JATIMRES/JBR	AGUNG SETYA	PENCOPETAN	AINUR RORIQ	TAHAP I	15-10-2015
4	LPK/0001/II/2016 /JATIMRES/JBR	FAJARUDIN	PENCURIAN	AINUR RORIQ	SP3	09-01-2016
5	LPK/0001/VI/2016 /JATIMRES/JBR	RIRI ADITAMA	PENGANIAYAAN BERAT	DEDY RETAFIKAL EFENDI	PENYELIDIKAN	09-01-2016

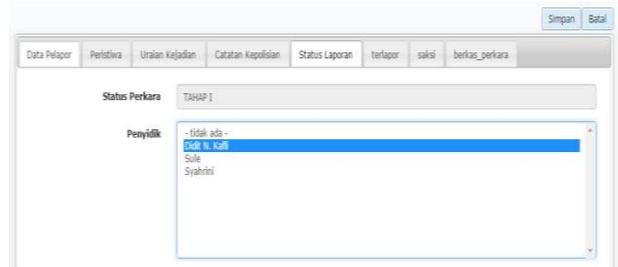
Gambar 7 Tampilan Halaman Tambah Laporan Polisi



Gambar 8 Tampilan Halaman Cetak Bukti Lapor

**Halaman Memilih Penyidik**

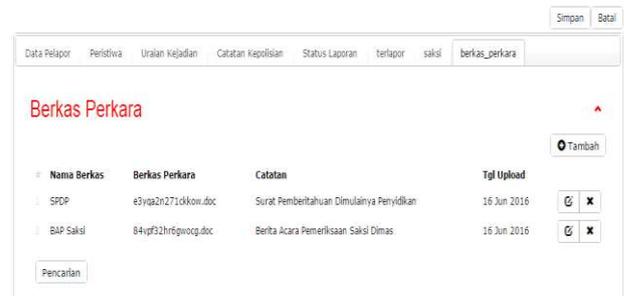
Halaman memilih penyidik berfungsi untuk memilih penyidik yang menangani kasus. Melalui halaman ini, Kasat dapat melihat laporan polisi yang masuk dan dapat memilih penyidik yang menangani kasus tersebut. Tampilan halaman memilih penyidik dapat dilihat pada gambar 9.



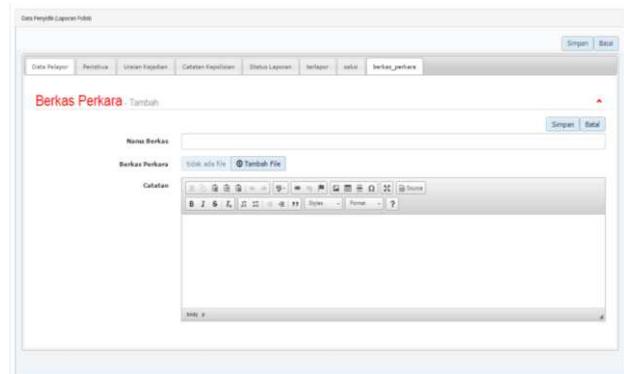
Gambar 9 Tampilan Halaman Memilih Penyidik

**Halaman Mengelola Berkas Perkara**

Halaman mengelola berkas perkara berfungsi untuk mengelola berkas perkara dari kasus yang ditangani oleh penyidik. Melalui halaman ini, penyidik dapat menambah atau mengubah data laporan polisi dan data berkas perkara. Tampilan halaman mengelola berkas perkara dapat dilihat pada gambar 10, tampilan halaman tambah dan ubah berkas perkara dapat dilihat pada gambar 11.



Gambar 10 Tampilan Halaman Mengelola Berkas Perkara



Gambar 11 Tampilan Halaman Tambah dan Ubah Berkas Perkara

**Halaman Mengelola Data PUSINAFIS**

Halaman mengelola data PUSINAFIS berfungsi untuk mengelola data PUSINAFIS dari tersangka dan pemohon SKCK. Melalui halaman ini, unit identifikasi dapat menambah dan mengubah data PUSINAFIS. Tampilan halaman mengelola data PUSINAFIS dapat dilihat pada gambar 12.



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH JAWA TIMUR  
WILAYAH BESUKI  
RESOR JEMBER

Tempat Kejadian Perkara: Mangli

**DATA KASUS JANUARI 2016 YANG DITANGANI POLRES JEMBER**

NO	LP	PERKARAPASAL	PENYIDIK	KET
1.	LP/06/2016/JATMRES.JEMBER	Percerahan/284 KUHP	ONY	P21
2.	LP/07/2016/JATMRES.JEMBER	Perkosaan/285 sub 287 KUHP	TRIMUJI	Tatap II
3.	LP/08/2016/JATMRES.JEMBER	Penganiayaan/KDRT	LILIS S	P21
4.	LP/09/2016/JATMRES.JEMBER	Perkosaan terhadap anak/285 KUHP	CHOLIFAH	DPO
5.	LP/10/2016/JATMRES.JEMBER	Pencurian sipon mobil/363 KUHP	TRIMUJI	P21
6.	LP/11/2016/JATMRES.JEMBER	Penganiayaan/252	ONY	Dicabut
7.	LP/012/2016/JATMRES.JEMBER	CUR HEWAN/363 KUHP	LILIS S	P21
8.	LP/013/2016/JATMRES.JEMBER	KDRT/Pasl 44 Uu No 23 Th 2004	ONY	Dicabut
9.	LP/014/2016/JATMRES.JEMBER	Pencabulan terhadap anak/287 KUHP	CHOLIFAH	Belum cukup bukti

Gambar 17 Tampilan Halaman Laporan Kriminalitas

## SIMPULAN

Sesuai analisis hasil uji coba fungsionalitas Aplikasi Penanganan Berkas Perkara di Polres Jember, maka dapat disimpulkan :

1. Aplikasi dapat memudahkan Kasat dalam memantau (monitoring) sebuah berkas perkara.
2. Aplikasi dapat mengarsipkan berkas-berkas perkara pidana.
3. Aplikasi dapat membantu petugas SKCK dalam melakukan proses penerbitan SKCK dan pemberian nomor SKCK secara otomatis.
4. Aplikasi dapat menghasilkan laporan kriminalitas dan laporan SKCK yang diterbitkan di Polres Jember.

## RUJUKAN

Kendall, K.E. dan Kendall, J.E. 2008. *System Analysis and Design seventh edition*. New Jersey: Pearson Education.

*Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor Dan Kepolisian Sektor*. Jakarta: Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.